



## Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Magelang

R.Permadi Mulajaya<sup>1</sup>, Charis Christiani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen FISIP UNTAG, Semarang, Indonesia

\*Corresponding author email: permadi-mulajaya@untagsmg.ac.id

### Article Info

#### Article history:

Received February 1, 2024

Approved March 5, 2024

#### Keywords:

Policy, Institutional  
Capacity, Destana,  
Magelang Regency

#### ABSTRACT

*Development of institutional capacity in disaster management in Magelang Regency through the Disaster Resilient Village (Destana). The number of disasters that occurred in Magelang Regency in 2022 was 624 disaster events consisting of strong winds or tornadoes, landslides, house fires, forest or land fires, floods and volcanoes. The aim of this research is to analyze the Institutional Capacity Development Policy through Disaster Resilient Villages (Destana) in Magelang Regency. The research methodology uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results found that institutional strengthening in the Destana program was achieved by establishing a Village Disaster Risk Reduction Forum (PRB). This forum has been formed since 2015 and is called "Ing Sasmita Response Forum (FORTIS)". Fortis consists of representatives from the community, government, vulnerable groups and representatives from women. Fortis has 30 members with 10 women (33%). Furthermore, strengthening institutions by forming a Volunteer Team (Disaster Preparedness Team) with volunteer team members coming from members of the PRB forum and volunteers. Apart from that, the Magelang Regency government also strengthened institutions by collaborating between institutions and areas closest to the border. However, this collaboration does not yet have a cooperation agreement (MoU) agreed upon by both parties, so it is not yet binding on the parties involved in disaster management.*

#### ABSTRAK

Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang melalui Desa Tangguh bencana (Destana). Jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebanyak 624 kejadian bencana yang terdiri dari angin kencang atau putting beliung, tanah longsor, kebakaran rumah, kebakaran hutan atau lahan, banjir, dan gunung api. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Kebijakan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Kabupaten Magelang. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa penguatan kelembagaan dalam program Destana dengan dibentuknya Forum Pengurangan risiko bencana (PRB) Desa. Forum ini sudah terbentuk

sejak tahun 2015 di berinama “ Forum Tanggap Ing Sasmita (FORTIS)”. Fortis beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, pemerintah, kelompok rentan maupun perwakilan dari perempuan. Fortis beranggotakan 30 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 10 orang (33%). Selanjutnya penguatan kelembagaan dengan membentuk Tim Relawan (Tim Siaga Bencana) dengan anggota tim relawan berasal dari anggota forum PRB dan relawan. Selain itu juga penguatan kelembagaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang dengan melakukan kerjasama antar Lembaga dan wilayah terdekat dengan perbatasan. Namun kerjasama tersebut belum memiliki perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati keduabelah pihak, sehingga belum mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Copyright © 2024, The Author(s).  
This is an open access article under the CC–BY-SA license

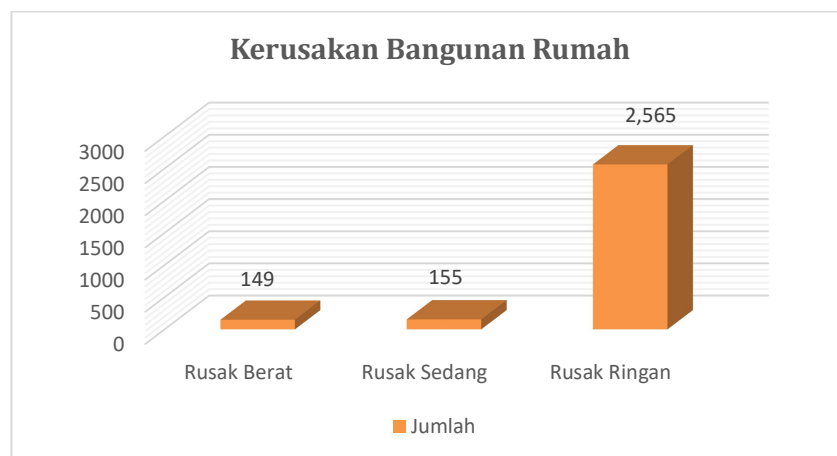


**How to cite:** Mulajaya, R., & Charis Christiani. (2024). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 693–701. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2466>

## PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana salah satunya melalui program desa Tangguh bencana (Destana). Kabupaten Magelang merupakan daerah di Jawa Tengah yang mempunyai potensi resiko bencana yang tinggi. Bencana merupakan suatu peristiwa sebagai bagian dari fenomena alam yang dapat mengancam kehidupan manusia (Faulkner, 2001). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang mencatat 624 kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2022. Akibatnya terdapat bangunan rumah yang mengalami 2.565 rusak ringan, 155 rusak sedang dan 149 rusak berat (<http://beritamagelang.id>).

Grafik 1  
Kerusakan Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022



Sumber: BPBD Kab. Magelang, 2022

Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yakni angin kencang atau puting beliung dan tanah longsor, disusul dengan kebakaran rumah, kebakaran hutan atau lahan, banjir,

gunungapi dan kejadian lain (<https://bpbd.magelangkab.go.id>). Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang. BNPB dalam menghadapi bencanadengan strategi melalui pengembangan desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana serta Peraturan bupati Nomor 48b Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang tahun 2018-2022.

Berdasarkan pertimbangan tersebut BNPB menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). *Disaster governance paradigms are the underlying ideas or approaches through which policy actors frame the disaster issue, develop policy goals and design policy instruments to reduce the risk of disasters* (Hall, 1993; Howlett, 2009). *Disasters such as floods, earthquakes and landslides are governed by a variety of actors through multiple competing disaster governance paradigms* (Manyena, 2012; McEntire, Fuller, Johnston, & Weber, 2002).

Kebijakan Destana dilaksanakan di Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 bertujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak yang merugikan akibat bencana. “Pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen Pemerintah, identifikasi risiko bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, pengaturan pelaku dan alokasi tugas dan kewenangan serta sumberdaya yang tersedia serta mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” (Nurjanah, Kuswanda, Siswanto, & Adikoesoemo, 2012). Perencanaan yang jelas memberikan arahan kebijakan serta penanggung jawab program agar dapat dilakukan secara efektif, sinergis, tidak terjadi *gap* dan *overlapping* aktifitas (Faturahman, 2018).

Kabupaten Magelang memiliki 8 Kecamatan rawan longsor yaitu kecamatan Borobudur, Windusari, Bandongan, Pakis, Ngablak, Salaman, Tempuran dan Kajoran. Ke-8 Kecamatan berada di zona lereng pegunungan dan perbukitan gunung Merapi, Merbabu, Sumbing dan Perbukitan Menoreh (<https://www.magelangkab.go.id>).Eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan oleh manusia juga merupakan faktor yang banyak menyebabkan terjadinya bencana longsor (Bachri, 2011). *Human interference such as through uncontrolled land use development in such a susceptible region seriously increases the frequency of landslides, especially during heavy rainstorms* (Karnawati, 20015).

Tabel 1  
Kecamatan Rawan Bencana Longsor di Kab. Magelang

| No. | Nama Kecamatan | Zona Bencana   |
|-----|----------------|--|
| 1.  | Borobudur      | Zona lereng pegunungan dan perbukitan gunung Merapi, Merbabu, Sumbing dan Perbukitan Menoreh |
| 2.  | Windusari      |  |
| 3.  | Bandongan      |  |
| 4.  | Pakis          |  |
| 5.  | Ngablak        |  |
| 6.  | Salaman        |  |
| 7.  | Tempuran       |  |
| 8.  | Kajoran        |  |

Sumber: BPBD Kab. Magelang, 2022

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melaksanakan Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) tahun 2015. Dengan bantuan dana APBN terdapat 3 desa tangguh bencana yaitu Desa Margoyoso, Desa Sirahan, dan Desa Ngargomulyo. Ketiga desa itu dipilih karena merupakan desa yang paling rentan terhadap resiko bencana tanah longsor dan puting beliung. Terdapat perbedaan karakter ancaman bencana di 3 desa tersebut yaitu Desa Ngargomulyo memiliki ancaman primer erupsi Gunung Merapi, Desa Sirahan mempunyai ancaman banjir, Desa Margoyoso daerah rawan bencana kekeringan dan tanah longsor (BPBD, 2022). Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi wewenang pemerintah pusat dan daerah yaitu membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan dalam penanggulangan bencana (Faturahman, 2018). Kebijakan pembuatan perencanaan penanggulan bencana didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Kebijakan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Kabupaten Magelang.

## **METODE**

Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Creswell, 2013). Proses dan hasil riset kualitatif dianggap berkualitas jika peneliti telah mempraktikkan kriteria kesahihan (*validity*) (Zamili, 2015). Menurut Creswell (2008) kesahihan (*validity*) penelitian kualitatif dengan dua strategi, yaitu validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dye (2013) mendefenisikan kebijakan publik sebagai *what government do, why they do it, and what differentit makes*. Menurut Dunn (2003) kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) untuk menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Proses kebijakan publik memang memiliki kerentanan untuk memuat kepentingan terselubung politis dari kelompok tertentu. Dibutuhkan pejabat-pejabat publik yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi dalam hal ini, pasalnya peranan dan perilaku manajer publik menjadi sebuah variabel penting yang menjadi penentu *tendensi* kebijakan publik (Howlett & Walker, 2012). Dalam kebijakan terdapat aktor yang terlibat menurut pendapat Knopfel et al (2007:45-57) ada tiga aktor utama dalam proses kebijakan atau yang lebih dikenal dengan "*the triangle of actors*". Terdiri dari *policy arena*, *public actors* and *affected actors*. *Policy arena*, merupakan mereka yang langsung terlibat secara formil dalam tiap proses kebijakan publik seperti pejabat politik dan birokrat. Sementara *public actors*, merupakan mereka yang terlibat secara tidak langsung dalam proses kebijakan namun pengaruhnya sebagai representasi publik amat diperhitungkan seperti akademisi, ormas dan lainnya. *Affected actors* merupakan mereka yang menjadi target group atau kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi (Grindle, 1997). "Untuk mengukur kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari 3 dimensi

yaitu pengembangan sumberdaya manusia (HRD), memperkuat organisasi, dan reformasi kelembagaan, dan matriks dimensi kapasitas kelembagaan” Grindle (1997).

Tabel 2  
*Dimensions and Focus of Capacity-Building Initiatives*

| <i>Dimension</i>                    | <i>Focus</i>  | <i>Types of Activities</i>  |
|-------------------------------------|---|---|
| <i>Human Resource Development</i>   | <i>Supply of professional and technical personnel</i>   | <i>Training, condition of work, recruitment</i>   |
| <i>Organizational Strengthening</i> | <i>Management system to improve performance of specific tasks and functions; micro structures</i> | <i>Incentive systems, utilization of personnel, leadership, organizational culture, communications, managerial structures</i> |
| <i>Institutional Reform</i>         | <i>Institutions and systems; macrostructures</i>  | <i>Policy and legal change, constitutional reform</i>   |

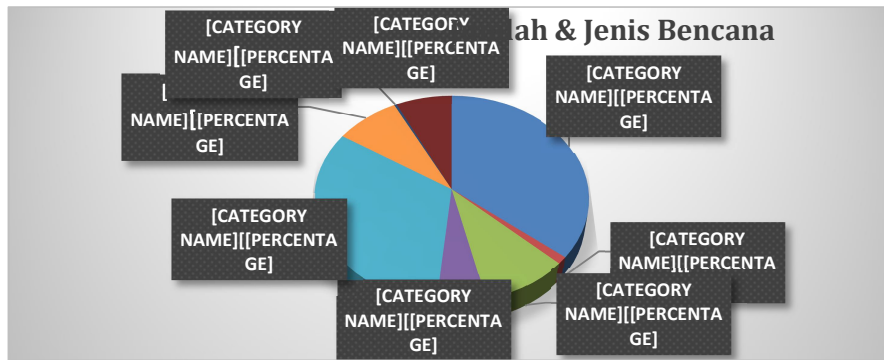
Sumber: Grindle, 1997

Penjelasan tabel di atas untuk mengukur kapasitas pengembangan kelembagaan pertama dapat diintervensi dari sumberdaya manusia secara terpadu meliputi upaya pelatihan, memperbaiki kondisi kerja, dan rekrutmen yang tepat terintegrasi. Kemudian dalam dimensi penguatan organisasi terpadu meliputi system insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajer terintegrasi. Sedangkan dalam dimensi reformasi kelembagaan terpadu mencakup system kelembagaan, dan struktur makro organisasi. Artinya untuk dapat membangun kapasitas kelembagaan, tiga aspek tersebut memegang peranan penting serta ketiga dimensi tersebut harus diupayakan dapat berjalan secara terpadu dalam suatu lembaga. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan lembaga yang mampu mengembangkan kapasitasnya dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Kebijakan publik menurut pandangan Dye (2013) *what government do, why they do it, and what different it makes*. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjalankan program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanganan bencana. Setelah program Destana dilaksanakan maka selanjutnya dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB) di tingkat desa. Pembentukan FPRB pertama di Kabupaten Magelang ialah desa Ngargomulyo yang dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat. FRB pertama yang ada di Kabupaten Magelang yang menginisiasi dibentuknya Forum PRB di tiga desa lain di Kecamatan Dukun yakni, Desa Sumber, Krinjing, dan Sengi (Maryoto, 2018). Lembaga BPBD Kabupaten Magelang melalui program Destana memberikan pengarahan dalam upaya penanggulangan bencana. Pola yang dilakukan dengan mengingat muatan-muatan yang ada di sekitar seperti mengenal bencana yang bias terjadi di lingkungan tempat tinggal. Penguatan kapasitas masyarakat, pemetaan jalur evakuasi, apa, siapa, dimana dan kapan mereka harus bertindak ketika terjadi bencana dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat mampu berdaya dan tangguh dalam menghadapi setiap kejadian bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Menurut pendapat Grindle (1997) “pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi”.

Pemerintah kabupaten Magelang melalui BPBD selalu mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mau pindah ke daerah yang lebih aman. Namun mereka menolak himbuan pemerintah dengan berbagai alasan. Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah proaktif sebagai bentuk usaha penanggulangan bencana. Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) untuk menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat (Dunn, 2003). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat akan rawan bencana. Selain itu juga melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan mewujudkan desa “Bersama” sebagai penyangg ata tempat penampungan evakuasi sementara jika terjadi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya untuk menyiapkan masyarakatnya untuk siap siaga dalam menghadapi setiap bencana yang akan melanda daerahnya. Sementara itu jumlah kejadian dan jenis bencana tertuang dalam diagram di bawah ini.

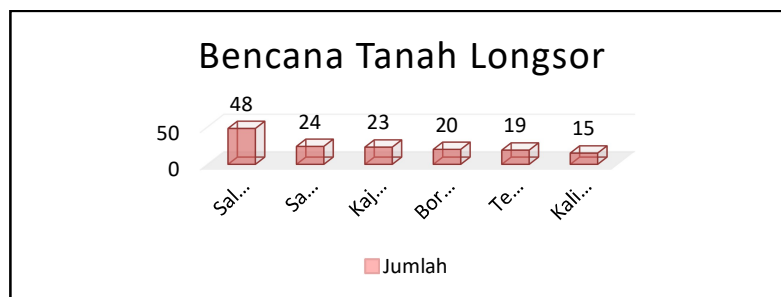
Diagram 1  
Sebaran Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022



Sumber: BPBD KabupatenMagelang, 2022

Pada tahun 2022 di Kabupaten Magelang telah terjadi bencana tanah longsor. Kejadian bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kecamatan Salaman dengan 48 kejadian. Disusul, Sawangan 24 kejadian, Kajoran 23 kejadian, Borobudur 20 kejadian, Tempuran 19 kejadian, dan Kaliangkrik 15 kejadian. Kecamatan lain seperti Bandongan, Candimulyo, Dukun, Grabag, Mertoyudan, Mungkid, Ngablak, Pakis, Salam, Secang, Srumbung, Tegalrejo dan Windusari, di bawah 10 kejadian tanah longsor.

Grafik 2  
Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022



Sumber: BPBD KabupatenMagelang, 2022

Dengan banyaknya jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang maka BPBD melakukan penguatan kelembagaan. Penanganan bencana dengan penguatan kelembagaan dapat dilihat dari sisi formal dan non formal. Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi (Grindle, 1997). Formal meliputi pemerintah pusat dan daerah, sementara non formal seperti forum-forum ditingkat nasional dan lokal yang dibentuk untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada dua jenis kelembagaan dalam program Destana yaitu :

a. Forum Pengurangan risiko bencana (PRB) Desa

Desa perlu membentuk forum PRB untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang terjadi diwilayahnya. Forum ini berada di luar struktur resmi pemerintahan desa namun pemerintah bisa terlibat di dalamnya. Forum ini dapat dibentuk secara khusus namun dapat mengembangkan forum yang sudah ada. Forum ini harus bisa mewakili semua unsur masyarakat dan mengikut sertakan kelompok marginal, rentan dan terpinggirkan dalam kepengurusannya, forum harus dapat menghadirkan dan menyuarakan kepentingan semua unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Forum perlu menjamin adanya kelompok kerja yang kompak, efektif, kreatif dan dapat dipercaya. Forum diberikan kewenangan dan status hukum yang pasti agar dapat menjalin kerjasama dan hubungan kelembagaan dengan pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lainnya. Forum di harapkan dapat menyusun rencana kerja yang realistis dan mudah dikerjakan dilengkapi dengan prioritas rencana aksi serta sumber penganggarnya. Forum ini sudah terbentuk sejak tahun 2015 di beri nama “ Forum Tanggap Ing Sasmita (FORTIS)”. Forum ini sudah dilengkapi dengan kepengurusan dan AD/ART serta dilegalisasi oleh Pemerintahan Desa dengan SK Kepala Desa Nomor 188.4/19/KEP/19/2015. Fortis sudah berjalan aktif dengan program-program pengurangan risiko yang terencana. Fortis beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, pemerintah, kelompok rentan maupun perwakilan dari perempuan. Fortis beranggotakan 30 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 10 orang ( 33%).

b. Tim Relawan (Tim Siaga Bencana)

Tim Relawan adalah kelompok masyarakat yang telibataktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Tim ini pada saat tidak terjadi bencana dapat berperan sebagai pendorong upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim relawan berasal dari anggota forum PRB namun lebih diutamakan dari mereka yang siapsediamenjadirelawanbencana.

Kedua kelembagaan Destana ini membutuhkan legalisasi agar (a) Pembudayaan partisipasi warga dan para pemangku kepentingan (b) Menjamin keberlanjutan Destanapasca program (c) Membangun dukungan politis penentu kebijakan di level komunitas desa (d) Kelembagaan yang jelas dan dilindungi sistem regulasi memberikan dasar hukum bagi lembaga untuk melakukan pengerahan sumberdaya (d) Terangarkan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pemerintah di level komunitas, misalnya APBDes.

Tujuannya adalan sebagai dasar yuridis untuk memasukkan rencana-rencana aksi dan kebutuhan ke dalam perencanaan pembangunan pemerintah maupun non pemerintah. Menjadi wadah untuk melestarikan rasa kegotong royongan. Terdapat pencegahan dan koreksi institusional atas pembangunan yang meningkatkan kerawanan bencana di tingkat desa dan adanya wadah rembugan antar pihak dalam penanganan bencana. Sementara kerjasama antar Lembaga dan wilayah dalam rangka pengurangan risiko bencana sudah ada upaya untuk melakukan kerjasama dengan desa lain. Pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan wilayah lain dalam rangka mengurangi risiko bencana. Kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama

dengan mengikuti pelatihan, simulasi dan bantuan relawan, bahan pangan maupun sarana prasarana. Namun kerjasama tersebut belum memiliki perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Dengan banyaknya jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang maka BPBD melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dalam program Destana dengan dibentuknya (1) Forum Pengurangan risiko bencana (PRB) Desa. Forum ini sudah terbentuk sejak tahun 2015 di beri nama “ Forum Tanggap Ing Sasmita (FORTIS)”. Fortis beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, pemerintah, kelompok rentan maupun perwakilan dari perempuan. Fortis beranggotakan 30 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 10 orang ( 33%). (2) Tim Relawan (Tim Siaga Bencana) dengan anggota tim relawan berasal dari anggota forum PRB dan relawan. Penguatan kelembagaan lainnya dengan melakukan kerjasama antar Lembaga dan wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sudah menjalin kerjasama dengan wilayah lain dalam rangka mengurangi risiko bencana. Namun kerjasama tersebut belum memiliki perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati kedua belah pihak, sehingga belum mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S. (2011). Analisis Daerah Rawan Longsor Untuk Penataan Penggunaan Lahan. *Pendidikan Geografi*, 16(1).
- BPBD: <https://bpbd.magelangkab.go.id/diunduh> pada tanggal 3 November 2020.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitatif, and Mixed Approach* (2nd ed). Thousand Oaks. California: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research; planning, conducting, and evaluating qualitative and quantitative research*. Boston: Pearson.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy, Fourteenth Edition*. United State: Pearson Education.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2).
- Faulkner, B. (2001). Towards a Framework for Tourism Disaster Management. *Tourism Management*, 2(2), 135-147.
- Grindle. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: MA, Harvard Institute for International Development.
- Hall, P. A. (1993). Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. *Comparative Politics*, 25, 275-296.
- Howlett, M. (2009). Process sequencing policy dynamics: Beyond homeostasis and path dependency. *Journal of Public Policy*, 29(3), 241-262.
- Howlett, M., & Walker, R. . (2012). Public Managers in the Policy Process: More Evidence on the Missing Variable? *The Policy Studies Journal*, 40 (2), 211–233.
- <https://www.magelangkab.go.id/diunduh> 1 November 2020.
- <http://beritamagelang.id/diunduh> pada tanggal 5 November 2020.
- Karnawati, D., Ibriam, I., Anderson, M.G., Holcombe, E. A., Mummery, G.T., Renaud, J.P & Wang, Y., An initial approach to identifying slope stability controls in Southern Java and



- to providing community-based landslide warning information. *Landslide Hazard and Risk*, eds. T. Glade, M.G. Anderson & M. J. Crozier, John Wiley and Sons: New York, pp. 733-763. 2015.
- Knopf, P., Laurue, C., Varone, F., & Hill, M. (2007). *Public Policy Analysis*. Bodmin: MPG Books.
- Manyena, S. B. (2012). Disaster and Development Paradigms: Too Close for Comfort? *Development Policy Review*, 30(3), 327-345.
- McEntire, D. A., Fuller, C., Johnston, C. W., & Weber, R. (2002). A Comparison of Disaster Paradigms: The Search for a Holistic Policy Guide. *Public Administration Review*, 62(3), 267-281.
- Nurjanah, R. S., Kuswanda, D., Siswanto, B., & Adikoesoemo. (2012). *Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, ( Jakarta: 2008).
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), (Jakarta: 2012).
- Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, (Magelang: 2011).
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, (Magelang: 2014).
- Setyaningsih, W., & Sholeh, M. (2010). Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah Di Wilayah Grabag Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. *Sains dan Teknologi*, 8, 1.
- Wuryanti, T. (2006). *Kerangka Aksi Hyogo: Pengurangan Resiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana*. Jakarta: MPBI.
- Yulianto, A., & Mutiarin, D. (2018). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana (DESTANA) (Studi Kasus Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8* (pp. 978-623-90018-0-3). Medan: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA).
- Yumantoko. (2019). Stakeholder Collaboration in Handling Disaster-Based Tourism Destination in The Rinjani Mountain National Park. *Journal of Forestry Research*, 3, 15-28.
- Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9(2), 283-304.  
<https://doi.org/10.35316/10.1234/vol3iss2pp230>